

## **BAB 5**

### **SIMPULAN DAN SARAN**

#### **5.1 Simpulan**

Penelitian ini dilakukan untuk menguji adanya pengaruh PAD, opini audit BPK dan tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah dengan *government size* sebagai variabel moderasi. Sampel pada penelitian ini yaitu kabupaten/kota di Indonesia periode tahun 2020 memiliki beberapa hasil yang dapat ditarik kesimpulan.

Pertama, variabel PAD dilakukan dengan pengukuran yaitu total PAD yang ada di dalam laporan realisasi. Berdasarkan hasil olah data PAD mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga besar atau kecilnya PAD suatu daerah maka akan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah.

Kedua, variabel opini audit BPK dilakukan dengan pengukuran yaitu menggunakan skor seperti WTP:5, WTP-DPP:4, WDP:3, TW:2 dan TMP:1. Berdasarkan hasil olah data opini audit BPK tidak mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga besar atau kecilnya skor opini audit tidak berperan langsung dalam LKPD serta tidak memiliki kewenangan untuk menilai laporan keuangan akan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah.

Ketiga, variabel tingkat kekayaan daerah dilakukan dengan pengukuran yaitu total pendapatan dibagi total PAD yang ada di dalam laporan realisasi. Berdasarkan hasil olah data bahwa tingkat kekayaan daerah mempunyai pengaruh terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Sehingga besar atau kecilnya tingkat kekayaan daerah maka akan memiliki pengaruh terhadap kinerja keuangan pada pemerintah daerah.

Keempat, variabel moderasi yaitu *government size* dilakukan dengan pengukuran yang diprosikan oleh total aset pemerintah daerah. Berdasarkan hasil

olah data yang dilakukan menunjukkan bahwa *government size* tidak memoderasi hubungan PAD terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan besar atau kecilnya sebuah total aset pemerintah daerah tidak dapat memoderasi hubungan kedua variabel.

Kelima, variabel moderasi *government size* tidak memoderasi hubungan opini audit BPK terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan besar atau kecilnya sebuah total aset pemerintah daerah tidak dapat memoderasi hubungan kedua variabel.

Keenam, variabel moderasi *government size* tidak memoderasi hubungan tingkat kekayaan daerah terhadap kinerja keuangan pemerintah daerah. Hal tersebut menunjukkan besar atau kecilnya sebuah total aset pemerintah daerah tidak dapat memoderasi hubungan kedua variabel.

## 5.2 Saran

Penelitian ini terdapat beberapa saran yang dapat diberikan ke beberapa pihak untuk menambahh referensi selanjutnya, antara lain:

- a. Bagi pemerintah daerah kab/kota, berdasarkan dari hasil penelitian ini dapat memberikan informasi mengenai alokasi dana untuk melakukan pengkajian terkait pemerataan dana yang disalurkan agar seluruh kab/kota di Indonesia tidak lagi ada yang menjadi daerah tertinggal sehingga dapat mengoptimalkan kinerja keuangannya untuk meningkatkan pelayanan publik.
- b. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat memberikan pengetahuan baru khususnya terkait kinerja keuangan pemerintah daerah untuk penambahan variabel independen lain yang tidak tercantum dalam penelitian ini seperti *leverage*, belanja modal dan temuan audit . Selain itu, dalam melakukan pengukuran kinerja keuangan pada pemerintah daerah selain menggunakan rasio efisiensi yang digunakan pada penelitian ini juga dapat menggunakan rasio efektifitas, kemandirian dan ekonomi.